

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Ungaran, 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan salah satu prioritas pembangunan berupa Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari implementasi RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dimana tahun 2025 sudah dapat memperkirakan dinamika pencapaian target RPD 2024-2026 yang sudah dilaksanakan di tahun 2024, sehingga kebijakan pembangunan daerah dengan tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas" dapat terlaksana dengan baik. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah program dan kegiatan tahun 2025 difokuskan untuk mencapai Tujuan Organisasi yaitu "Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah" yang juga merupakan Indikator Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dalam mewujudkan indikator tujuan, Dinas Ketahanan Pangan membagi lagi menjadi 3 Sasaran yaitu 1) Meningkatkan Keterjangkauan/Akses Pangan, 2) Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan 3) Meningkatkan Pemanfaatan Pangan. Untuk mewujudkan Meningkatnya Ketersediaan Pangan maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah antara lain berupa Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Dokumen Informasi Ketersediaan

Pangan Masyarakat, Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal dan Kajian Pencegah *Food Loss* dan *Food Waste*. Selanjutnya untuk Meningkatkan Keterjangkauan/Akses Pangan strategi yang akan dilakukan antara lain berupa Penyediaan Informasi Harga Pangan, GPM (Gelar Pangan Murah), Subsidi Harga Pangan (Konsumen dan Produsen), Fasilitasi Distribusi Pangan, Pemantauan Harga Pangan, Dokumen Distribusi Pangan, Subsidi Pangan Penanganan PoU, Subsidi Pangan Penanganan Stunting, Penyusunan Peta FSVA, Penyusunan Peta SKPG, Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin. Sedangkan untuk Meningkatkan Pemanfaatan Pangan maka strategi yang akan dilakukan oleh DISHANPAN antara lain berupa Fasilitasi Desa B2SA, Pengenalan/promosi pangan lokal dan B2SA, Pengawasan dan Edukasi Keamanan Pangan, Pendampingan Doksistu Organik dan Pelayanan Uji Mutu Keamanan Pangan dan Sertifikasi Organik.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan beserta pengalokasian pagu indikatif yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Rancangan Renja DISHANPAN disusun dengan mempertimbangkan upaya akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengutamakan belanja untuk masyarakat, efisiensi dan efektifitas pada belanja pendukung kegiatan serta memastikan *redliness criteria* kegiatan yang akan dilaksanakan. Renja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjabarkan rencana strategis DISHANPAN ke dalam rencana operasional tahun 2025;
- b. Menjaga konsistensi capaian target kinerja program/kegiatan dan standar pelayanan minimal DISHANPAN tahun 2025 dengan Renstra DISHANPAN Tahun 2024-2026.
- c. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pangan.
- d. Menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPS, RAPBD dan APBD tahun 2025.

2. Tujuan

- a. Memberikan landasan operasional dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025;
- c. Mewujudkan konsistensi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan provinsi tahun 2025 dengan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024

Bab ini memuat reviu evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian tahun 2024 sampai TW II; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pangan; reviu terhadap rancangan awal RKPD serta telaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 dan manajemen risiko strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 serta manajemen risiko program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 DAN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan 2024 Capaian Renstra PD

Dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa Program Kegiatan untuk mencapainya. Berdasarkan matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 terdiri dari 7 (Tujuh) indikator Program yang telah dicapai yaitu; Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas dengan tingkat capaian 100,02%; CV harga pangan startegis (beras) 344,83%; Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan 103%; Angka konsumsi beras 103,16%; Persentase penurunan daerah rawan pangan 5.256%; Persentase PSAT yang memenuhi syarat kemandirian dan mutu pangan 107,98%; Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan 125%.

Realisasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan 2024 mengacu pada APBD 2023 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023 sedangkan Realisasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Saling berkolaborasi antara kegiatan satu dengan yang lainnya, serta didukung dengan proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang matang menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja hasil/keluaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa Indikator tahun 2023 yang tingkat ketercapaiannya diatas target, yang disebabkan oleh: 1). Stabilitasnya harga pangan, terutama beras yang dipengaruhi kebijakan Pemerintah pusat, seperti mendatangkan beras dari luar negeri (Impor) serta kebijakan pengendalian inflasi bahan pangan dengan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga melalui aktivitas-aktivitas seperti Gelar Pangan Murah (GPM), Subsidi Harga Panganserta Fasilitasi Distribusi Pangan, 2). Penurunan Daerah Rawan Pangan yang signifikan, dikarenakan telah melalui fase *Covid-19* sehingga indikator-indikator yang ada pada Peta FSVA (*Food Security And Funerability Atlas*) dapat tercapai dan 3). Antusiasnya masyarakat dalam mempercayakan pengujian pada BPMKP.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	-	-	-
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	-	-	-
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	-	-	-
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	2	4	23	23	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang	Dokumen	2	2	6	6	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang	Dokumen	2	2	17	17	100	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tugas ASN	pendukung pelaksanaan tugas ASN									
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	2	2	12	12	100	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	1	1	4	4	100	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	0	0	0	0	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Daerah									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	50	41	74	74	100	-	-	-
		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	5	6	100	166,67	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	12	12	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	100	-	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	1	1	12	12	100	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	12	12	12	100	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	3	3	1	2	200	-	-	-
		Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	2	1	1	1	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	100	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	Kkal/kap/hari	3.732	3797	4020	4021	100,02	-	-	-
		CV harga pangan strategis (beras)	%	4,8	2,14	2	0,58	344,83	-	-	-
		Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	0,67	2,41	1	1,03	103	-	-	-
		Angka Konsumsi Beras	Kg/Kap/Th	91,4	87,90	91,40	88,60	103,16	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Kelompok	15	5	0	0	100	-	-	-
		Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	Laporan	2	2	2	2	100	-	-	-
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	83,56	100	217,93	217,93	-	-	-
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	16,67	5	6,25	125	-	-	-
	Sub Keziata Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan	Laporan	2	1	13	13	100	-	-	-
		Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	Kali	5	4	16	16	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Paket	15	5	0	0	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	Laporan	1	1	12	12	100	-	-	-
		Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Paket	1	1	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	Kelompok	35	28	-	-	-	-	-	-
		Jumlah lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	Lokasi	10	0	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Presentase peningkatan volume cadangan pangan	%	7	8,61	50	139,16	278,32	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah CPP yang disediakan (beras)	Ton	300	497,52	370	410,45	110,93	-	-	-
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	35	28	849	849	98,59	-	-	-
		Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,15	0,17	0,15	0,19	126,67	-	-	-
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	Kg/Kap/Th	87	92,90	87	94	108,5	-	-	-
		Konsumsi kelompok pangan hewani	Kg/Kap/Th	34	36,30	34	35,40	104,12	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	Kelompok	40	30	37	37	100	-	-	-
		Analisa PPH	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan	Kelompok	35	25	28	28	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sumber Daya Lokal	pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi									
		Jumlah Promosi dan edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	Kali	5	4	4	4	100	-	-	-
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	80,79	80	86,38	107,98	-	-	-
		Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%	80	90,76	80	100	125	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	%	10	10	10	12	120	-	-	-
		Persentase PSAT teregistrasi di peredaran	%	23	86,64	67	88,74	132,45	-	-	-
		Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	Angka	83,5	93	83,50	80	95,81	-	-	-
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	Angka	70	93,19	70	95,63	136,61	-	-	-
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Laporan	3	4	3	3	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	300	300	345	463	134,20	-	-	-
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	250	225	940	1051	111,81	-	-	-
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok	24	20	25	25	100	-	-	-
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan sertifikasi dan registrasi	Sertifikat	38	117	70	103	147,14	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sampel pangan yang diuji	Sampel	70	605	395	619	156,71	-	-	-
		Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboratorium BPMKP	Paket	1	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	58,73	1	52,56	5256	-	-	-
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	4,45	17,79	4,91	5,56	113,24	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	Desa	34	30	34	34	100	-	-	-
		Peta SKPG dan atau FSVA	Dokumen	1	1	1	1	100	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	-	-	-	-	-	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	3	3	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	-	-	-	-	-	93	93	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	100
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	-	-	-	-	-	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	-	-	-	-	-	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	-	-	-	-	-	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	-	-	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	0	0	0
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	0	0	0
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	20	20	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	-	-	-	-	-	5	5	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	20	20	100
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	-	-	-	-	-	36	36	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	-	-	-	-	-	36	36	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	0	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	-	-	-	-	-	76	76	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	24	24	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	2	2	100
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	40	40	100
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	10	10	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	-	-	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	8	8	100	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	-	18	18	100	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	-	-	-	-	-	1,25	1,25	100	
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	-	-	-	-	-	0,06	0,06	100	
		Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	-	-	-	-	-	-	0,62	0,62	100
		Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	-	-	-	-	-	-	60	60	100
		Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	-	-	-	-	-	-	0,62	0,62	100
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	-	-	-	-	-	-	87,80	87,80	100
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	-	-	-	-	-	-	87,80	87,80	100
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	%	-	-	-	-	-	20	20	100	
		Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	%	-	-	-	-	-	5	5	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan Sop	%	-	-	-	-	-	100	100	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi	Kelompok	-	-	-	-	-	10	10	100
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Distribusi Pangan Melalui Sistem Logistik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
		Volume Bahan Pangan Yang Difasilitasi Pendistribusiannya Untuk Stabilisasi Pasokan	Ton	-	-	-	-	-	550	550	100
	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Informasi Harga Pangan	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
		Jumlah Intervensi Harga Pangan	Paket	-	-	-	-	-	3	3	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan Yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal Dan Pangan Pokok Lokal Yang Difasilitasi	Kelompok	-	-	-	-	-	25	25	100
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat	%	-	-	-	-	-	20	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (DMP)	%	-	-	-	-	-	20	20	100
		Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	-	-	-	-	-	3	3	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Lumbung Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi/Dibina	Kelompok	-	-	-	-	-	10	10	100
		Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Rawan Pangan Yang Difasilitasi/Dibina	Kelompok	-	-	-	-	-	10	10	100
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Yang Dikelola	Ton	-	-	-	-	-	85	85	100
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provins	PPH Kab / Kota > 87	Angka	-	-	-	-	-	33	33	100
		PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	-	-	-	-	-	33	33	100
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	-	-	-	-	-	10	10	100
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	-	-	-	-	-	2500	2500	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,	Jumlah Desa B2SA Yang Difasilitasi	Desa	-	-	-	-	-	3	3	100
		Jumlah Desa B2SA Di Daerah Rawan Pangan Yang Difasilitasi	Desa	-	-	-	-	-	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Dokumen Analisis PPH	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	-	-	-	-	-	0,01	0,01	100
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	%	-	-	-	-	-	5	5	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Desa Rawan Pangan Dan Gizi Yang Difasilitasi	Desa	-	-	-	-	-	22	22	100
		Jumlah Desa Stunting Yang Diintervensi	Desa	-	-	-	-	-	15	15	100
		Jumlah Peta FSVA Yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Kerawanan Pangan Lintas Sektor	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Tersusunnya Dokumen Menejemen Food Loss Dan Atau Food Waste	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Tersusunnya Peta Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	-	-	-	-	-	80	80	100
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	-	-	-	-	-	80	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun*	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun**	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
		Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	%	-	-	-	-	-	15	15	100
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	-	-	-	-	-	65	65	100
		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Lokasi Pengawasan Ijin Edar	Lokasi	-	-	-	-	-	40	40	100
		Jumlah Masyarakat Yang Teredukasi Tentang Mutu Dan Keamanan Pangan	Orang	-	-	-	-	-	200	200	100
		Jumlah Sampel Pangan Segar Yang Diawasi	Sampel	-	-	-	-	-	200	200	100
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Kelompok Yang Didampingi Dalam Penyusunan Doksistu	Kelompok	-	-	-	-	-	7	7	100
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Dalam Penerapan Higiene Sanitasi	Kelompok	-	-	-	-	-	18	18	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	-	-	-	-	-	35	35	100
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	Sampel	-	-	-	-	-	100	100	100

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	22	8	5	62,50	8
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	54	18	10	55,55	18
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	3	1	33,33	3
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	286	93	93	100	93
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	36	12	6	50	12
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	9	2	0	0	2
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	2	0	0	2
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3	1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	4	2	50	4
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	3	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	4	2	50	4
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	91	91	0	0	91
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	6	50	12
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	6	50	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporam	3	1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	12	6	50	12
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	43	20	10	50	70
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	14	5	4	80	20
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	43	20	10	50	70
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	14	5	4	80	20
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	12	6	50	12
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	6	50	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36	12	6	50	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	220	76	38	50	76
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	39	12	4	33,33	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	72	24	12	50	24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2	1	50	2
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	140	40	20	50	40
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	32	10	4	40	10
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	70	60	91,67	120	60
		Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0,64	0,62	0	0	0
		Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0,64	0,62	0	0	0
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,07	0,06	0,3	500	0,5
		Rata-rata kecukupan pangan	Angka	1,25	1,25	2	120	1,25
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,80	88,60	99,10	87,80
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,80	88,60	99,10	87,80
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau	Jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan	Dokumen	3	1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
		Prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP	%	100	100	0	0	100
		Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	5	0	0	5
		Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	5	16,67	333	333
		Persentase peningkatan kapasitas usaha pada lembaga usaha pangan masyarakat	%	22	20	0	0	0
	Sub Kejiata Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen pelaksanaan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Dokumen	36	12	6	50	12
		Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Ton	1.250	550	467,77	85,05	950
		Lembaga usaha pangan masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	30	10	0	0	10
	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah informasi harga pangan	Dokumen	36	12	6	50	12
		Jumlah intervensi harga pangan	Paket	9	3	2	66,67	3
	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan ketersediaan pangan yang disusun	Dokumen	36	12	6	50	12
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	%	5	3	0	0	5
		Persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat	%	20	20	0	0	0
		Persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat (DMP)	%	20	20	0	0	0
	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola	Ton	343	85	0	0	520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi/dibina	Kelompok	40	10	100	1000	100
		Lumbung pangan masyarakat di desa rawan pangan yang difasilitasi/dibina	Kelompok	42	10	100	1000	100
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal yang difasilitasi	Kelompok	85	25	15	60	25
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH Kab / Kota > 87	Angka	35	33	35	106,06	33
		PPH Kab / Kota > 87 (DRP)	Angka	35	33	35	106,06	33
100	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	37	10	5	50	10
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	14.500	2.500	0	0	2.250
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Desa	72	12	12	100	12
		Jumlah desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Desa	17	3	3	100	3
		Jumlah dokumen analisis PPH	Dokumen	3	1	0	0	1
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	84	80	93,48	116,85	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	80	96,97	121,21	80
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Prosentase kelompok / pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya	%	25	15	0	0	15
		Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	70	65	93,48	143,82	65
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah lokasi pengawasan ijin edar	Lokasi	160	40	40	100	40
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	950	200	180	90	300
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	850	200	324	162	300
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	19	7	7	100	7
		Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi	Kelompok	67	18	5	27,77	18
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	Sampel	310	100	115	115	150
	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	116	35	60	171,42	55
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	0,01	0	0	0,01
	Kegiatan Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	0,01	0,01	0	0	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	Tersusunnya peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	3	1	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Capaian Realisasi Target Akhir Renja 2024
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi							
		Jumlah rekomendasi kebutuhan kerawanan pangan lintas sektor	Dokumen	3	1	0	0	1
		Jumla peta FSVA yang disusun	Dokumen	3	1	0	0	1
		Tersusunnya dokumen menejemen food loss dan atau food waste	Dokumen	3	1	0	0	1
		Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi yang difasilitasi	Desa	72	22	22	100	22
		Jumlah desa Stunting yang diintervensi	Desa	55	15	15	100	15

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Provinsi Jawa Tengah	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (kg/kapita/tahun)	87,7	125.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANG AN MASYARAKAT	Provinsi Jawa Tengah	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (kg/kapita/tahun)	87,7	125.000
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (kg/kapita/tahun)	87,7	1.625.000			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (kg/kapita/tahun)	87,7	1.625.000
			Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (%)	55	7.440.000			Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (%)	55	7.440.000
			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0.38	5.333.888			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0.38	5.333.888

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Rata – Rata Ketercukupan Pangan	1,25	100.000			Rata – Rata Ketercukupan Pangan	1,25	100.000
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media		PPH Kab/Kota > 87 (DRP)	34	125.000	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PPH Kab/Kota > 87 (DRP)	34	125.000
			PPH Kab / Kota > 87	34	875.000			PPH Kab / Kota > 87	34	875.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (%)	10	5.333.888			Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (%)	10	5.333.888

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun (dokumen)	1	750.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun (dokumen)	1	750.000
	Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga (%)	4	1.500.000			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga (%)	4	1.500.000
			Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (%)	100	5.940.000			Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (%)	100	5.940.000
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (dokumen)	1	100.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (dokumen)	1	100.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan (%)	80	1.300.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan (%)	80	1.300.000
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu Pangan (%)	92	1.000.000			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu (%)	92	1.000.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	300.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	300.000
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	280.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	280.000
			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran (%)	67	50.000			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran (%)	67	50.000
			Persentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkat Levelnya (%)	20	370.000			Persentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkat Levelnya (%)	20	370.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi (%)	0,01%	3.930.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi (%)	0,01%	3.930.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi (%)	5,5%	3.930.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi (%)	5,5%	3.930.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (%)	100%	19.872.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat (%)	100%	19.872.529
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (%)	100%	632.500			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (%)	100%	632.500
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	100%	750.000			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	100%	750.000
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (%)	100%	750.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (%)	100%	750.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	16.104.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	16.104.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)	2	118.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)	2	118.000
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP (dokumen)	1	40.000			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP (dokumen)	1	40.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (laporan)	1	6.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (laporan)	1	6.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (%)	100%	197.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (%)	100%	197.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (%)	100%	1.038.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (%)	100%	1.038.000
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (%)	100%	74.000			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (%)	100%	74.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	15	671.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	15	671.600
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP (unit)	15	100.000			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP (unit)	15	100.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (laporan)	36	1.344.062	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (laporan)	36	1.344.062

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (laporan)	26	348.500			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (laporan)	36	348.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (unit)	100	393.645	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (unit)	100	393.645
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (unit)	17	70.000			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (unit)	17	70.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan pada kebijakan **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”** dengan fokus pembangunan daerah meliputi : 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, 3) Peningkatan berkelanjutan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dan 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu meningkatnya keterjangkauan/akses pangan dengan indikator sasaran prosentase penanganan kecamatan rawan pangan dan rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras), meningkatnya pemanfaatan pangan dengan indikator sasaran Skor PPH Provinsi, meningkatkan ketersediaan pangan dengan indikator sasaran angka kecukupan energi, meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator sasaran indeks manajemen risiko (IMR). Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,1
		Meningkatkan Keterjangkauan/ Akses Pangan	Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	6
			Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	10
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	95,2
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita /hari	3.801
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejala ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2025
SASARAN								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	9	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Penyediaan pangan merata di seluruh daerah	Kepala Dinas	2025
Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Memberikan intervensi berupa bantuan pangan	Kepala Dinas	2024 - 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dishanpan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pemerintah bidang pangan) dengan total Pagu Anggaran Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp 40.727.296.000,-. Program yang dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 9.693.000.000,-
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 2.765.000.000,-.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp 4.170.000.000,-.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 24.099.296.000,.

Rincian kegiatan untuk masing-masing program diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2025		2026			
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah																	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82	24.099.296.000		84	24.799.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											23.239.296.000		23.799.500.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	23.239.296.000		84	23.799.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								23.239.296.000		23.799.500.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	22.321.500.000		100	22.670.000.000	SEKRETARIAT
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1	17.733.000.000		1	18.150.000.000	
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	3	17.733.000.000		3	18.150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0.001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.900.000.000		17.200.000.000		
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	16.900.000.000		100	17.200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0.002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				378.000.000		400.000.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	378.000.000		12	400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0.003					Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				455.000.000		550.000.000		
										Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	455.000.000		12	550.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada						140.000.000		155.000.000		

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Kode (5)	Program (6)	Indikator Program (7)	Kegiatan (8)	Indikator Kegiatan (9)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah (17)
												2025		2026		
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
								administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	1.164.184.000	100	1.430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		120.000.000	
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		162.000.000	
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	150.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.005					Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan				90.000.000		108.000.000	
										Jumlah paket bahan cetakan dan pengandaan yang disediakan	Paket	12	90.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		20.000.000	
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0	-	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.435.000		100.000.000	
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.435.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.009					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		700.000.000	
										Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	600.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		20.000.000	
										Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.011					Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				108.749.000		200.000.000	
										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	Dokumen	12	108.749.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2025		2026		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										elektro nik pa da pera ngkat dae ra h						
				X.XX.01.1.07			Pe ng adaa n Bara ng Mi lik Da era h Pe nunja ng Urusa n Pe merinta h Dae ra h						1.027.000.000		603.000.000	
							Jumla h unit bara ng mi lik dae ra h pe nunja ng urusa n pe me rinta h dae ra h ya ng disediaka n				Unit	10	1.027.000.000	10	603.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.07.010					Pe ng adaa n Sara na da n Prasarana Ge dung Ka nto r atau Bangunan Lainnya				1.027.000.000		603.000.000	
										Jumla h unit pera lata n da n mesin lainnya ya ng disediaka n	Unit	10	1.027.000.000	5	603.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.08			Pe nye diaan Jasa Pe nunja ng Urusa n Pe me rinta h n Daerah						1.385.316.000		1.222.000.000	
							Jumla h lapora n pe nye diaan jasa penunja ng urus an peme rintahan daera h ya ng disusun				Laporan	36	1.385.316.000	36	1.222.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.08.001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		12.000.000	
										Jumla h lapora n pe nye diaan jasa surat me nyurat	Laporan	12	6.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08.002					Pe nye diaan Jasa Ko munikasi, Sumbe r Da ya Air da n Listrik				400.000.000		440.000.000	
										Jumla h la po ra n nye diaa n jasa ko munikasi, s umbe r da ya air da n listrik ya ng disediaka n	Laporan	12	400.000.000	12	440.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.08.004					Pe nye diaan Jasa Pe laya na n Umum Ka nto r				979.316.000		770.000.000	
										Jumla h lapora n pe nye diaan jasa pe laya na n umum ka nto r ya ng disediaka n	Laporan	12	979.316.000	12	770.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.09			Pe me liharaa n Bara ng Mi lik Da era h Pe nunja ng Urusa n Pe merinta ha n Dae ra h						680.000.000		850.000.000	
							Jumla h unit bara ng mi lik dae ra h pe nunja ng urusa n peme rintahan daera h ya ng dilakuk a n pe me lihara n				Unit	107	680.000.000	76	850.000.000	SUB BAGIA N UMUM DA N KE PE GA WAIAN
				X.XX.01.1.09.0					Penyediaan Jasa Pe me liharaa n, Biaya				300.000.000		350.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah		
												2025		2026				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				002					Pe me liha raa n, Pa jak da n Perizinan Ke nda raa n Dinas Ope rasiona l ata u La pa nga n									
										Jumlah kendaraan pe rora nga n dinas ata u kenda raa n dinas ja bata n ya ng dipe lihara dan diba ya rka n pa jak nya	Unit	25	300.000.000	24	350.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.009					Pe me liha raa n/ Rehabi litasi Gedung Ka nto r dan Ba ng una n Lainnya				300.000.000		400.000.000			
										Jumla h ge dung ka nto r da n ba ng una n lainnya ya ng dipelihara/dir ehabilitasi	Unit	2	300.000.000	2	400.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.010					Pe me liha raa n/ Rehabi litasi Sara na da n Pras ara na Gedung Ka nto r ata u Ba ng una n Lainnya				80.000.000		100.000.000			
										Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penduku ng Gedu ng Kantorata u Bangunan Lainnya	Unit	80	80.000.000	50	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPM KP					%	100	917.796.000		1.129.500.000		Balai Pen ingkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							40.000.000		40.000.000		
									Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPM KP		Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000			
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						109.296.000		333.500.000			
									Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPM KP		%	100	109.296.000	100	333.500.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		24.000.000			
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	Paket	12	20.000.000	8	24.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
										kantor yang disediakan							
				X.XX.01.1.06.004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.296.000			220.000.000	
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	14.296.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000			20.000.000	
										Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-			7.500.000	
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0	-	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000			20.000.000	
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000			42.000.000	
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				225.000.000			200.000.000	
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPKM	Unit	2	225.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				225.000.000			200.000.000	
										Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	225.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2025		2026		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353.500.000		296.000.000	
							Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPM KP				Laporan	36	353.500.000	36	296.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000	
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		140.000.000	
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	185.000.000	12	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				162.500.000		150.000.000	
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	162.500.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.000.000		260.000.000	
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPM KP				Unit	11	190.000.000	13	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09.009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		200.000.000	
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09.010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		60.000.000	
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	40.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2025		2026		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah											860.000.000		1.000.000.000	
			Indeks Ma na je me n Risiko								Angka	3	860.000.000	3	1.000.000.000	Dinas Keta ha na n Pa nga n
				X.XX.01	PROGRAM PE N UNJA N G URUSAN PE MERINTAHAN DAE RA H PROVI NSI								860.000.000		1.000.000.000	
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja pe ra ngkat da era h					%	100	860.000.000	100	1.000.000.000	SEK RET A RIAT
				X.XX.01.1.01			Pere ncanaa n, Pe nga ngg ara n, da n E va luasi Kine rja Pe ra ngk at Dae ra h						860.000.000		1.000.000.000	
								Persentase dokumen pe re nca naa n, da n e va luasi pe ra ngkat da era h ya ng disusun s esuai pe rat ura n pe runda nga n			%	100	860.000.000	100	1.000.000.000	SUB BA GIA N PROGRAM
				X.XX.01.1.01.001					Pe nyus una n Dok ume n Pere ncanaa n Pera ngkat Dae ra h				410.000.000		500.000.000	
										Jumlah dokumen perenca naan perangkat dae ra h	Dok umen	7	410.000.000	7	500.000.000	SUB BA GIA N PROGRAM
				X.XX.01.1.01.007					Evaluasi Kinerja Pera ngkat Dae ra h				450.000.000		500.000.000	
										Jumla h la po ran e va luasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	450.000.000	18	500.000.000	SUB BA GIA N PROGRAM
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)													6.906.500.000		9.175.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Keta ha na n Pa ng an										Skor	83,1		83,1	9.175.000.000	Dinas Keta ha na n Pa nga n
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan											3.470.000.000		4.600.000.000	
			Rata-rata de viasi ha rg a pangan strategis (beras)								%	10	3.470.000.000	10	4.600.000.000	Dinas Keta ha na n Pa nga n
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATA N DI VE RSIFIK ASI DA N KET AHAN AN PA NGA N MAS YA RAKA T								3.470.000.000		4.600.000.000	
						Persentase komo ditas pangan strategis de nga n ha rg a efektif sesuai kete nt ua n ya ng berla ku					%	55	3.470.000.000	70	4.600.000.000	Bidang Ketersediaan da n Stabi lisasi Pa nga n
				2.09.03.1.01		Penyediaan da n Pe nya lura n Pa ng a n Pokok atau Panga							3.470.000.000		4.600.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							n Lainnya ses uai de ng an Kebutuhan Daerah Provisi da lam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan										
								PERSEN TASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADANLEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT			%		21	220.000.000	22	450.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.01.003					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					220.000.000		450.000.000	
										LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT DIFASILITASI	Kelompok		10	220.000.000	10	450.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
								PERSEN TASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA			%		4	1.900.000.000	5	2.600.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.01.003					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1.900.000.000		2.600.000.000	
										JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen		12	900.000.000	12	1.800.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
										VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton		550	1.000.000.000	450	800.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
								PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP			%		100	1.350.000.000	100	1.550.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
				2.09.03.1.01.009					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi					1.350.000.000		1.550.000.000	
										JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen		12	200.000.000	12	250.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
										JUMLAH INTERVENSIF HARGA PANGAN	Paket		3	1.150.000.000	3	1.300.000.000	Sub Koordinator STABILISASI

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Kode (5)	Program (6)	Indikator Program (7)	Kegiatan (8)	Indikator Kegiatan (9)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah (17)	
												2025		2026			
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan															PASOKAN DAN HARGA PANGAN
			Angka Kecukupan Energi								kkal/ kapita/hari	3801		3.436.500.000	3.803	4.575.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									3.436.500.000		4.575.000.000	
						Rasio cadangan pangan masyarakat					Angka	0,63	75.000.000	0,64	525.000.000		Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							75.000.000		525.000.000		
								PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT			%	20	75.000.000	20	525.000.000		Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.02.005					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				75.000.000		525.000.000		
										LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI /DIBINA	Kelompok	10	75.000.000	20	525.000.000		Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi					Angka	0,22	3.161.500.000	0,071	3.600.000.000		Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							3.161.500.000		3.600.000.000		
								PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI			%	3	3.161.500.000	5	3.600.000.000		Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.02.005					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				3.161.500.000		3.600.000.000		
										JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	233	3.161.500.000	258	3.600.000.000		Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
						Rata-rata kecukupan pangan					Angka	1,25	200.000.000	1,25	450.000.000		Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau							200.000.000		450.000.000		

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Kode (5)	Program (6)	Indikator Program (7)	Kegiatan (8)	Indikator Kegiatan (9)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah (17)	
												2025		2026			
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
							Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
								JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN			Dokumen	1	200.000.000	1	450.000.000		Sub Koordinator KETERSEDIAAN PANGAN
				2.09.03.1.01.0013					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				200.000.000		450.000.000		
										JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	200.000.000	12	450.000.000		Sub Koordinator KETERSEDIAAN PANGAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)													9.721.500.000		12.845.321.000		Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Ketahanan Pangan										Skor	83,05		83,1	12.845.321.000		Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan											5.095.000.000		6.075.321.000		
			Persentase penanganan kecamatan rawan pangan								%	6	5.095.000.000	7	6.075.321.000		Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								925.000.000		1.525.000.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)					kg/kapita /tahun	87,7	850.000.000	87,6	1.525.000.000		Bidang Pengantaragaman Konsumsi Pangan
				2.09.03.1.04			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						850.000.000		1.000.000.000		
								PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)			Angka	34	850.000.000	35	1.000.000.000		Sub Koordinator PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN B2S A
				2.09.03.1.04.002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman(B2S A)			850.000.000		1.000.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2025		2026		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	22	850.000.000	25	1.000.000.000	Sub Koordinator PENGEMBAANGAN KONSUMSI PANGAN B2SA
						Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)					Angka	0,63	75.000.000	0,64	525.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						75.000.000		525.000.000	
								PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)			%	20	75.000.000	20	525.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUTUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.02.005					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				75.000.000		525.000.000	
										LUMBU NG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/ DIBINA	Kelompok	10	75.000.000	20	525.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUTUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								4.170.000.000		4.550.321.000	
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi					%	0,01	4.170.000.000	0,01	4.550.321.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
				2.09.04.1.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						4.170.000.000		4.550.321.000	
								PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI			%	5,5	4.170.000.000	6	4.550.321.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
				2.09.04.1.02.004					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				4.170.000.000		4.550.321.000	
										JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	20	3.425.000.000	25	2.750.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH DESASTUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	10	125.000.000	20	1.000.000.000	Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH PETA SVAYANG DISUSUN	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTA SEKTOR	Dokumen	1	30.000.000	1	150.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										TERSUUNYA DOKUMEN	Dokumen	1	490.000.000	1	500.321.000	Sub Koordinator

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Kode (5)	Program (6)	Indikator Program (7)	Kegiatan (8)	Indikator Kegiatan (9)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah (17)	
												2025		2026			
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
										MENEJEMEN FOOD LOSS DAN WASTE							KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
										TE RSUS UNN YA PET A KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dok umen	1	50.000.000	1	75.000.000		Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan											4.626.500.000		6.770.000.000		
			Skor PPH provinsi								Skor	95,2	4.626.500.000	94,7	6.770.000.000		Dinas Keta hana n Pa nga n
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DI VE RSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										1.861.500.000		3.280.000.000
							Angka k onsumsi be ras Provi nsi Ja wa T e nga h				kg/ka pita /tahun	87,7	1.861.500.000	87,6	3.280.000.000		Bidang Pengankaragaman Konsumsi Pangan
				2.09.03.1.01			Penyediaa n da n Pe nya lura n Pa ng a n Pokok atau Panga n Lainnya ses uai de ng an Kebutuha n Dae ra h Provi nsi da la m ra ngka Stabi lisasi Pasok a n da n Harga Pa nga n								761.500.000		1.400.000.000
									REK OME N DA SI KET E RSE DIA AN SUMBE RDA YA PAN GAN LOKA L YA NG DIS US UN		Dok umen	1	761.500.000	1	1.400.000.000		Sub Koo rdinato r PEN GE MBA N GAN PA NGA N LOKA L
				2.09.03.1.01.002					Penyediaan Pa nga n Berbasis Sumbe r Daya Loka l						761.500.000		1.400.000.000
										JUMLA H KE L OMPOK / PELAK U USA HA PE NGE MBA NGA N PAN GAN OLAHAN LOKAL DAN PA NGA N POK OK L OKAL YA NG DIFA SILITASI	Kelompok	20	761.500.000	30	1.400.000.000		Sub Koo rdinato r PEN GE MBA N GAN PA NGA N LOKA L
				2.09.03.1.04			Pro mosi Pe nca paian Ta rget Ko nsumsi Panga n Pe rka pita/Ta hun s esuai de nga n A ngka Kec uk upa n Gizi								1.100.000.000		1.880.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							mela lui Media Provinsi										
								PPH Kab / Kota > 87			Angka		34	1.100.000.000	35	1.880.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARA GAMAN KON SUMSI PANGA N
				2.09.03.1.04.001					Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				800.000.000		1.530.000.000		
										Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	10	450.000.000	12	500.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARA GAMAN KON SUMSI PANGA N	
										Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibagikan	Paket	2500	350.000.000	7000	1.030.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARA GAMAN KON SUMSI PANGA N	
				2.09.03.1.04.002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				300.000.000		350.000.000		
										JUMLAH DESA B2SA YANG DIPA SILITASI	Desa	5	250.000.000	6	300.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARA GAMAN KON SUMSI PANGA N	
										JUMLAH DOKUMEN ANA LISIS PPH	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARA GAMAN KON SUMSI PANGA N	
				2.09.05	PROGRAM PENGA WASAN KEAMANAN PANGAN								2.765.000.000		3.490.000.000		
						Persentase pang an segar asal tumbuha n yang me me nuhi syarat ke a ma na n dan mut u pa nga n					%	92	1.365.000.000	84	1.915.000.000	Bidang Ke a ma na n Pa nga n	
				2.09.05.1.01			Pe laksana an Pengaw asan Kea ma na n Pa nga n Segar Distribusi Lintas Da era h Kab upate n/ Kota						1.365.000.000		1.915.000.000		
								JUMLAH DOKUMEN REKOMEN DASI KEA MA NAN PANGA N SEGA R YANG DISUSUN*			Dokumen	1	380.000.000	1	450.000.000	Sub Koordinator KERJASAMA DAN KEAMANAN PANGAN	
				2.09.05.1.01.011					Koordinasi dan sinkronisasi kea ma na n da n mut u pa nga n segar asal tumbuha n				380.000.000		450.000.000		

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Kode (5)	Program (6)	Indikator Program (7)	Kegiatan (8)	Indikator Kegiatan (9)	Sub Kegiatan (10)	Indikator Sub Kegiatan (11)	Satuan (12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah (17)
												2025		2026		
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
										JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASITENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Ora ng	250	380.000.000	350	450.000.000	Sub Koordinator PERJASAMADAN KEAMANAN PANGAN
								JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASIKAN SEGA R YANG DISUSUN**			Dokumen	1	475.000.000	1	450.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan				475.000.000		450.000.000	
										JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGA R YANG DIAWASI	sampel	250	475.000.000	300	450.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
								Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran			%	67	75.000.000	70	200.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan				75.000.000		200.000.000	
										JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	50	75.000.000	60	200.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
								PROSES ASEKELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENESANITASINYA MENINGKAT LEVEL NYA			%	20	435.000.000	25	815.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.009					Pengujian ke lembaga pengawasan keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan				435.000.000		815.000.000	
										Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	4	120.000.000	8	265.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
										JUMLAH PELAKU USAHAYANG DIBINA DALAMPENERAPAN HIGIENESANITASI	Kelompok	22	315.000.000	25	550.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
								Persentase rekomendasi mutu dan keamanandan pangan yang diterbitkan			%	80	1.400.000.000	80	1.575.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
				2.09.05.1.01				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribu					1.400.000.000		1.575.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							si Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah sertifikat jami na n mutu dan ke a ma na n pa ng an pa da ba lai				Dokumen	2	1.400.000.000	2	1.575.000.000		Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.006					Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				700.000.000		850.000.000		
										Jumlah dokumen sertifikat data/ata u registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	700.000.000	40	850.000.000		Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.010					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				700.000.000		725.000.000		
										Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	100	700.000.000	105	725.000.000		Sub Koordinator PENGUJIAN PANGAN
JUMLAH												40.727.296.000					

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (***risk appetite***). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (***risk register***), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (pernyataan risiko, skala risiko, penyebab risiko, dampak risiko, rencana tindak lanjut atas risiko, pemilik risiko dan target waktu penyelesaian) yang tertuang pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragama n Konsumsi Pangan	Desember 2026
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragama n Konsumsi Pangan	Desember 2026
	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				cadangan pangan minimal pemerintah				
	Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	9	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi	Adanya Kegiatan Fasilitas Distribusi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
KEGIATAN								
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025
	PPH Kab / Kota > 87	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Akses Pangan Masyarakat Terganggu	9	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau	Harga pangan fluktuatif	Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di setiap wilayah secara periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harga Pangan				semua wilayah Jawa Tengah				
	Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	9	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2024-2026
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	12	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah	Validasi Data secara Periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemuahan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat	Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan	9	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan	Kesehatan masyarakat terganggu	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Bidang Keamanan Pangan	2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keamanan Dan Mutu Pangan	syarat keamanan dan mutu pangan		Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan				
KEGIATAN								
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pelaku usaha	9	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Kesehatan masyarakat terganggu	Sosialisasi kepada pelaku usaha dan petugas	Bidang Keamanan Pangan	2025
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti instansi lain	9	Instansi lain memiliki prioritas kegiatan yang berbeda dengan yang direkomendasik an	Kesehatan masyarakat terganggu	koordinasi dengan instansi terkait	Bidang Keamanan Pangan	2025
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024 - 2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				terhadap aspek yang lain				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	10	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024-2026

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan Dishanpan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Rencana Strategis Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, Hasil Evaluasi Kinerja Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 serta penggalian masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dengan salah satu prioritas daerah berupa pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta semakin sejahtera dan lestari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana sehingga Rencana Kerja (Renja) Dishanpan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan melalui perwujudan Pengentasan Desa Rawan Pangan dan Gizi melalui Subsidi Pangan Penanganan PoU dan Subsidi Pangan Penanganan Stunting, Kajian Pencegahan *Food Loss* dan *Food Waste*, Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Fasilitasi Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Pengenalan Pangan Lokal dan B2SA serta Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pengimplementasikan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

LAMPIRAN

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	Strategis Pemda	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Proses reformasi yang tidak terkoordinasi dengan baik	Operasional OPD	Kurangnya pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dengan reformasi sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidaksesuaian antara berbagai langkah yang diambil	Upaya reformasi menjadi tidak terarah dan tersebar	Dishanpan Prov. Jateng
2	Sasaran Strategis PD	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	Strategis OPD	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Bertambahnya daerah rawan pangan	Strategis OPD	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Desa rawan pangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						terhadap aspek yang lain		
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor PPH Provinsi mengalami penurunan	Strategis OPD	Pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan dengan kaidah B2SA belum tersebar secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah masih terbiasa dengan pola konsumsi pangan yang kurang beragam serta bergantung pada beberapa komoditas strategis saja	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan publik yang disediakan tidak memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat	Operasional OPD	Tidak responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi sehingga mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan yang berkualitas	Penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat akan merasa tidak terlayani dengan baik	Dishanpan Prov. Jateng
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Belum semua Indikator dilakukan analisa risiko	Operasional OPD	elaksana kegiatan kurang teliti dalam menganalisa risiko	Menurunnya Indeks Manajemen Risiko	Dishanpan Prov. Jateng
3	Program	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	Operasional OPD	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Masyarakat Jawa Tengah
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	Operasional OPD	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Masyarakat Jawa Tengah
			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Tidak terpenuhinya cadangan pangan	Operasional OPD	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Provinsi	minimal		kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah		
			Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	Operasional OPD	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Komoditas Pangan Startegis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	Operasional OPD	Memasuki masa panen bulan Februari s.d. April petani mengalami puso dikarenakan bencana alam	Permintaannya banyak, produksi sedikit, sehingga harga menjadi mahal dan beras Jawa Tengah banyak yang ke luar daerah.	Masyarakat Jawa Tengah
4	Kegiatan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	Operasional OPD	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Masyarakat Jawa Tengah
			PPH Kab / Kota > 87	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	Operasional OPD	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Masyarakat Jawa Tengah
5	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Dokumen rekomendasi ketersediaan sumber daya pangan lokal tidak tersusun	Operasional OPD	belum tersedianya data dan informasi potensi ketersediaan pangan lokal dan pelaku usaha pangan lokal di Jawa Tengah	Informasi pengembangan pangan lokal tidak tersedia	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Tidak berjalannya Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	Operasional OPD	Fasilitasi dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan	Pendapatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat tidak meningkat	Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang difasilitasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Akses Pangan Masyarakat Terganggu	Operasional OPD	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	Operasional OPD	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Masyarakat Jawa Tengah
				Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga belum sesuai SOP	Kemitraan	Keterbatasan dalam melaksanakan monev di lapangan	Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga tidak sesuai sasaran dan tujuan kegiatan tidak dapat tercapai secara optimal.	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangan Yang Diusulkan	Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Operasional OPD	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah	Masyarakat Jawa Tengah
6	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	Operasional OPD	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Masyarakat Jawa Tengah
7	Program	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Operasional OPD	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu pangan	Kepatuhan	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan	Adanya aduan dari Masyarakat, Kesehatan Masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
8	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak diditindaklanjuti pelaku usaha	Operasional OPD	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak diditindaklanjuti instansi lain	Operasional OPD	Instansi lain memiliki prioritas kegiatan yang berbeda dengan yang direkomendasikan	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang belum teregistrasi	Operasional OPD	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Produk pangan segar di peredaran belum terjamin mutu dan keamanan pangannya	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	Kelompok/ pelaku usaha belum memahami prinsip higiene sanitasi penanganan pangan	Operasional OPD	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Adanya aduan masyarakat/pelaku usaha terkait pelayanan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan	Operasional OPD	SDM Tidak menjalankan pelayanan sesuai dengan SOP	Rendahnya pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha	Masyarakat Jawa Tengah
10	Program	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penurunan Daerah Rawan	Bertambahnya daerah rawan pangan maksimal	Operasional OPD	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal,	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level	Desa rawan pangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pangan Dan Gizi			Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	prioritas yang lebih tinggi	
11	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	Fraud	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat	Desa rawan pangan
12	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	Penunjang OPD	Kurangnya strategi yang jelas dan kurangnya koordinasi antar unit kerja menghambat pencapaian standar yang diharapkan	Menghambat efisiensi dan efektivitas operasi perangkat daerah	Dishanpan
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	Operasional OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Menurunnya tingkat pelayanan umum perangkat daerah di BPMKP	BPMKP
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)	Penunjang OPD	Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target	Menurunnya indeks manajemen risiko	Dishanpan
13	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Menurunnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang OPD	Tidak sesuai rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan Waktu penginputan aplikasi penganggaran yang	Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						terbatas/singkat Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target		
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data awal dan tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Penunjang OPD	Data yang disampaikan tidak akurat dan sering terjadi perubahan	Penyediaan gaji dan tunjangan tidak tepat waktu, menurunnya kinerja pelaksana kegiatan, dan penyajian laporan yang kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah Dishanpan	Penunjang OPD	Kurangnya ketelitian dalam penatausahaan inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	Penunjang OPD	Kurang ketelitian dalam inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah	Penunjang OPD	Data yang disampaikan tidak akurat	Penyajian data laporan pendapatan yang kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	Penunjang OPD	Sistem layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak akurat, dapat terjadi kesalahan dalam pengelolaan	Kesalahan dalam pencatatan informasi personal dapat menciptakan ketidakpuasan di antara pegawai	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			layanan			data pegawai		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan tidak sesuai standar, sehingga proses administrasi akan menjadi kurang efisien dan produktif.	Penunjang OPD	Kurangnya standar dalam layanan administrasi umum dapat menyebabkan proses-proses menjadi tidak terstruktur	Kurangnya standar dapat meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam proses administrasi	Dishanpan
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	Penunjang OPD	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	BPMKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Perencanaan pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Penunjang OPD	Kurangnya koordinasi dalam pengadaan peralatan dan mesin	Peralatan dan mesin tidak digunakan secara optimal	Dishanpan
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Pengadaan alat dan bahan laboratorium yang non TKDN tidak disetujui	Penunjang OPD	Pengadaan alat dan bahan laboratorium mayoritas merupakan produk impor	Mengurangi kualitas/kuantitas pelayanan pengujian	BPMKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilaksanakan secara optimal	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran tidak tersedia dengan cukup	Menggangu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dishanpan
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran	Menggangu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	BPMKP

Tabel 2. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan PD									
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	4	4	16	Ada	Sislogda, edukasi promosi B2SA	Memadai	3	4	12
Proses reformasi yang tidak terkoordinasi dengan baik	3	3	9	Ada	Menerapkan Rencana aksi yang terperinci dan terarah untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.	Memadai	2	2	4
Sasaran Startegis PD									
Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	4	3	12	Ada	Penyediaan pangan merata di seluruh daerah	Memadai	3	3	9
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	3	4	12	Ada	Intervensi harga	Belum Memadai	3	4	12
Bertambahnya daerah rawan pangan	4	3	12	Ada	Memberikan intervensi berupa bantuan pangan	Memadai	3	3	9
Skor PPH Provinsi mengalami penurunan	4	2	8	Ada	Edukasi B2SA, Promosi B2SA, Pencanaan Program Desa B2SA	Memadai	3	2	6
Pelayanan publik yang disediakan tidak memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat	2	3	6	Ada	Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyediaan layanan publik dapat membantu memahami lebih baik terkait kebutuhan masyarakat	Memadai	2	2	4
Belum semua Indikator dilakukan analisa risiko	3	3	9	Ada	engadakan kegiatan penyusunan register risiko dipandu narasumber	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan									
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	4	3	12	Ada	Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	3	9
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	4	3	12	Ada	Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	3	9
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	4	3	12	Ada	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Memadai	3	3	9
Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	3	4	12	Ada	Adanya Kegiatan Fasilitasi Distrbusi	Memadai	3	3	9
Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan Kegiatan	2	3	6	Ada	Fasilitasi distribusi, subsidi harga	Belum Memadai	2	3	6
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	4	3	12	Ada	Koordinasi PPH	Belum Memadai	4	3	12
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target Kegiatan	4	3	12	Ada	Koordinasi PPH	Belum Memadai	4	3	12
Dokumen rekomendasi ketersediaan sumber daya pangan lokal tidal tersusun	4	2	8	Ada	FGD Pengembangan Pangan Lokal	Memadai	3	2	6
Tidak berjalannya Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	2	3	6	ada	Identifikasi Kebutuhan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Memadai	2	2	4
Akses Pangan Masyarakat Terganggu	3	3	9	Ada	Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di setiap wilayah secara periodik	Belum memadai	3	3	9
Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	3	3	9	Ada	Penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Belum memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Harga belum sesuai SOP	3	3	9	Ada	Penyusunan juknis, melaksanakan monev saat pelaksanaan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Bertambahnya daerah rawan pangan	4	3	12	Ada	Memberikan intervensi berupa bantuan pangan	Memadai	3	3	9
Kegiatan									
Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Melakukan pemeriksaan bantuan pangan sebelum disalurkan	Memadai	2	5	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	2	2	4	Ada	Menggunakan instrumen manajemen kinerja yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja unit kerja serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.	Memadai	1	2	2
Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan rutin pada pelayanan umum kepegawaian dan keuangan (BPMKP)	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)	2	3	6	Ada	Melaksanakan kegiatan sesuai target	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Menurunnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	3	6	Ada	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data awal dan tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	3	5	15	Ada	Menyediakan formulir/isian data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar bidang, balai dan sekretariat	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah	3	3	9	Ada	Evaluasi berkala terhadap penatausahaan inventaris barang milik daerah	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan rutin administrasi barang milik daerah BPMKP	Memadai	3	2	6
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah	2	4	8	Ada	Menyediakan formulir/isian data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar bidang, balai dan sekretariat	Memadai	1	2	2
Kegiatan									
Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mencapai standar yang diharapkan	2	3	6	Ada	Evaluasi rutin terhadap proses-proses administrasi kepegawaian untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dengan standar layanan yang telah ditetapkan	Memadai	1	2	2
Kegiatan									
Layanan tidak sesuai standar, sehingga proses administrasi akan menjadi kurang efisien dan produktif.	2	2	4	Ada	Telah mengembangkan standar yang jelas untuk setiap aspek layanan administrasi umum	Memadai	1	2	2
Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Perencanaan pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan kebutuhan	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan bagian perencanaan dan bidang	Memadai	2	2	4
Pengadaan alat dan bahan laboratorium yang non TKDN tidak disetujui	3	4	12	Ada	Pembuatan ijin belanja barang non TKDN dilakukan dari awal tahun anggaran	Memadai	3	2	6
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
penunjang urusan pemerintah daerah					penunjang urusan pemerintah daerah				
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (BPMKP)	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilaksanakan secara optimal	2	3	6	Ada	Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Memadai	2	2	4
Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	2	3	6	Ada	Pemeliharaan Rutin	Memadai	2	2	4

Tabel 3. Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tujuan				
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Kepala Dinas	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat
Sasaran				
Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	9	Kepala Dinas	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen
Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Kepala Dinas	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim
Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi
Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi
Kegiatan				
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif
Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kabupaten/Kota tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif
Akses Pangan Masyarakat Terganggu	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif
Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.
Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	12	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah
Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi
Program Pengawasan Keamanan Pangan				
Pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu pangan	9	Bidang Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dan Pengawasan PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan	Adanya aduan dari Masyarakat, Kesehatan Masyarakat terganggu
Kegiatan				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pelaku usaha	9	Bidang Keamanan Pangan	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Kesehatan masyarakat terganggu
Rekomendasi tidak ditindaklanjuti instansi lain	9	Bidang Keamanan Pangan	Instansi lain memiliki prioritas kegiatan yang berbeda dengan yang direkomendasikan	Kesehatan masyarakat terganggu
Program Penanganan Kerawanan Pangan				
Bertambahnya daerah rawan pangan maksimal	9	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi
Kegiatan				
Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	10	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2025
SASARAN								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi Jawa Tengah tidak terpenuhi	9	Tidak tercukupinya ketersediaan pangan Jawa Tengah untuk komoditas pangan hewani, sayur dan buah	Energi/Kalori masyarakat tidak cukup untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Penyediaan pangan merata di seluruh daerah	Kepala Dinas	2025
Meningkatnya Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025
Meningkatnya Keterjangkauan	Prosentase penanganan desa	Bertambahnya daerah rawan	9	Desa Rawan Pangan belum	Desa Rawan Pangan yang	Memberikan intervensi berupa	Kepala Dinas	2024 - 2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
/Akses Pangan	rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	pangan		tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	bantuan pangan		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal secara optimal di masyarakat	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2026
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras diatas angka ideal	9	Pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pengganti komoditas beras belum berkembang dan dikenal	ketersediaan bahan pangan alternatif pengganti beras di masyarakat masih minim	Fasilitasi Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				secara optimal di masyarakat				
	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal pemerintah	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025
	Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Pangan Strategis di masing-masing wilayah Jawa Tengah tidak tercukupi	9	Akses Pangan dan distribusi kurang maksimal	Kecukupan Pangan di tingkat Rumah Tangga tidak terpenuhi	Adanya Kegiatan Fasilitasi Distrbusi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
KEGIATAN								
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kot a tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025
	PPH Kab / Kota > 87	Skor PPH Kab/Kota tidak tercapai sesuai target	12	Kabupaten/Kot a tidak memiliki analisis masalah yang relevan dengan variabel pada penghitungan PPH	Langkah promotif dan intervensi yang dilakukan kurang efektif	Koordinasi dengan Bapanas dan BPS guna menganalisis variabel pembentuk skor PPH di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Desember 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Akses Pangan Masyarakat Terganggu	9	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis, Pendistribusian bahan pangan tidak dapat menjangkau semua wilayah Jawa Tengah	Harga pangan fluktuatif	Pemantauan ketersediaan dan harga pangan di setiap wilayah secara periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
	Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Masih ada disparitas/ volatile harga pangan strategis	9	Intervensi harga pangan belum optimal	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2024-2026
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	12	Data yang tersedia tidak update	Pangan tidak tersedia secara merata sepanjang tahun di wilayah Jawa Tengah	Validasi Data secara Periodik	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	2025
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak terpenuhinya cadangan pangan minimal	9	Kurang optimalnya sarpras penunjang pemenuhan kebutuhan cadangan pangan minimal	Kekurangan cadangan pangan pemerintah provinsi	Penitipan cadangan pangan pemerintah provinsi ke Gapoktan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Desember 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Bertambahnya daerah rawan pangan	9	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal, Intervensi hanya berupa bantuan pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024 - 2026
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Bantuan pangan tidak sesuai spesifikasi	10	Adanya mark-up harga pada saat pengadaan bantuan pangan	Menurunnya kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat, adanya aduan masyarakat	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2024-2026



DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH